

RINGKASAN

**YUDHA
ARMANDA
SAMOSIR
NIM 220510088**

**Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Penyidik
Polri dalam Kasus Salah Tangkap (Studi Putusan Nomor
10/Pid.Pra/2024/PN Bdg)
(Ferdy Saputra, S.H., M.H. dan Albert Alfikri S.Sy., M.
Hi.)**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan salah tangkap dalam pelaksanaan kewenangan penyidik Polri yang dapat merugikan hak seseorang. Permasalahan tersebut salah satunya terdapat dalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg, yang menyatakan tindakan penangkapan tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban penyidik Polri dalam kasus salah tangkap serta pertanggungjawaban hukum penyidik atas tindakan penangkapan yang dinyatakan tidak sah. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan menjadi bahan pemahaman mengenai batas kewenangan serta pertanggungjawaban penyidik Polri.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban penyidik Polri dalam kasus salah tangkap dapat dilakukan melalui mekanisme administratif, disiplin, etik, pidana, dan perdata sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, pihak yang dirugikan dapat memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi sesuai ketentuan hukum. Putusan praperadilan yang menyatakan penangkapan tidak sah tidak secara langsung menjatuhkan sanksi kepada penyidik, tetapi dapat menjadi dasar untuk dilakukan pemeriksaan melalui mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa hukum telah menyediakan mekanisme pertanggungjawaban terhadap penyidik Polri dalam kasus salah tangkap. Oleh karena itu, penyidik harus melaksanakan kewenangan penangkapan secara profesional, cermat, dan sesuai dengan ketentuan hukum untuk mencegah terjadinya salah tangkap serta melindungi hak-hak masyarakat.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Penyidik, Salah Tangkap (Error in Persona), Praperadilan, Penyidik Polri.

SUMMARY

**YUDHA
ARMANDA
SAMOSIR
NIM 220510088**

**Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Penyidik
Polri dalam Kasus Salah Tangkap (Studi Putusan Nomor
10/Pid.Pra/2024/PN Bdg)
(Ferdy Saputra, S.H., M.H. dan Albert Alfikri S.Sy., M.
Hi.)**

This research is motivated by the issue of wrongful arrest in the exercise of the authority of Indonesian National Police investigators, which may infringe upon individual rights. One such issue is reflected in Decision Number 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg, which declared the arrest unlawful. This research aims to examine and analyze the legal regulations concerning the legal accountability of Indonesian National Police investigators in cases of wrongful arrest, as well as the legal accountability of investigators for an arrest declared unlawful. This research is expected to contribute to the development of legal studies and provide an understanding of the limits of investigators' authority and their legal accountability.

This research employs a normative juridical method using a statutory approach, case approach, and conceptual approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively.

The results show that the legal accountability of Indonesian National Police investigators in cases of wrongful arrest may be pursued through administrative, disciplinary, ethical, criminal, and civil mechanisms, depending on the nature of the violation. In addition, the affected party may be entitled to compensation and rehabilitation in accordance with applicable law. A pretrial decision declaring an arrest unlawful does not directly impose sanctions on the investigator but may serve as a basis for further examination through the applicable accountability mechanisms.

The conclusion of this research is that the law provides various mechanisms for holding Indonesian National Police investigators accountable in cases of wrongful arrest. Therefore, investigators must exercise their arrest authority professionally, carefully, and in accordance with applicable legal provisions to prevent wrongful arrests and protect the rights of individuals.

Keywords: Investigator Accountability, Wrongful Arrest (Error in Persona), Pretrial Proceedings, Indonesian National Police Investigators.